

# PROFIL PRANATA SOSIAL DI DAERAH KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (Studi Kehidupan Sosial Budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Suyanto

## ABSTRAK

*Pranata sosial adalah kumpulan nilai dan norma yang mengatur kehidupan manusia. Kebudayaan yang didalamnya terdapat nilai, norma dan perasaan juga merupakan pola bagi tindakan dan tingkah laku manusia yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan sosialnya. Dalam kehidupan yang nyata, kebudayaan digunakan secara selektif oleh para pendukungnya, tergantung pada situasi dan kondisi, serta arena sosial tempat para pendukung kebudayaan tersebut melakukan kegiatannya. Pengetahuan yang kompleks bagi kegiatan tertentu tersebut dikenal sebagai pranata-pranata kebudayaan atau cultural institutions.*

*Pendekatan yang digunakan dalam studi sosial budaya adalah pendekatan kebudayaan yang dalam ilmu antropologi digolongkan sebagai pendekatan Ethnoscience atau cognitive anthropology. Dalam pendekatan semacam ini warga masyarakat terasing yang menjadi sasaran studi sosial budaya akan dilihat sebagai individu-individu yang aktif memahami, memanipulasi atau memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di lingkungan hidup sosialnya dengan cara menggunakan dan berpedoman pada kebudayaan yang dimilikinya, agar supaya mereka tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Achadiyat, 1994). Dengan demikian pranata sosial memiliki status dan peran, peran disini berujud aturan yang berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bertindak, dimana dalam setiap tindakan selalu dilakukan berdasarkan pertimbangan norma dan nilai yang hidup. Pranata sosial bersifat non formal karena tidak memiliki struktur aturan yang tidak tertulis, terbentuk karena kesepakatan kebutuhan suatu komunitas dan diakui keberadaannya dan dipertahankan pada komunitas tertentu.*

*Dari hasil kajian diketahui bahwa pengaruh kepala adat (Raja Biboki) di Kampung Tamkesi sangat kuat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kesetiaan rakyatnya terhadap berbagai pranata yang masih berlaku di masyarakat pedalaman terutama di kampung adat Tamkesi wilayah desa Tautpah, pranata tersebut antara lain; Pranata keagamaan atau kepercayaan, pranata pendidikan, pranata ekonomi, pranata sosial dan pranata keturunan. Namun karena Raja Biboki memiliki wawasan yang luas dan menginginkan adanya perubahan kehidupan bagi rakyatnya, dengan cara mereka menyerahkan sebagian wilayahnya untuk dijadikan sebagai sarana program pemberdayaan yang dimulai melalui program pemukiman di Kampung Tautpah. Tujuan Raja Biboki tersebut adalah dengan berhasilnya program pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah diharapkan budaya masyarakat pedalaman yang masih bermukim di hutan-hutan pedalaman wilayah desa Tautpah dan desa Tokbesi bisa merubah sebagian adat kebiasaan yang ada kearah kehidupan yang lebih baik. Secara rinci terdeskripsi dalam hasil penelitian ini.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pranata sosial adalah kelembagaan masyarakat yang diprediksikan semakin banyak jumlah dan ragamnya sesuai dengan kebutuhan komunitas lokal yang mem-bentuknya. Dibentuk atas prakarsa warga masyarakat setempat atau etnis tertentu, misalnya didasarkan atas agama, sosial maupun ekonomi. Sebenarnya pranata sosial juga ada yang telah terdaftar di instansi

pemerintah namun terbatas di instansi pemerintah setempat. Pranata inilah yang diperkirakan cukup banyak jumlahnya di masyarakat dan keberadaannya dibutuhkan masyarakat atau komunitas lokal. Pranata pada komunitas adat tertentu selanjutnya disebut dengan kearifan lokal.

Kemudian dilihat dari geografis dimana komunitas tersebut berdomisili berada dapat dibedakan berdasarkan daerah perkotaan, pinggiran kota, perdesaan, pegunungan, pesisir

pantai, pertanian (perkebunan) dan komunitas adat terpencil (masyarakat terasing). Keberadaan pranata sosial secara geografis tentunya memiliki perbedaan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi masyarakat atau komunitas lokalnya. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perubahan sosial ekonomi dan politik yang tengah terjadi di Indonesia, tidak tertutup kemungkinan berpengaruh pula pada keberadaan pranata sosial tersebut. Adanya desentralisasi atau yang dikenal dengan otonomi daerah, banyak program-program pembangunan yang telah menyentuh sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat di era reformasi dan globalisasi. Sentuhan program pembangunan tersebut tentunya secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keberadaan dan eksistensi kelembagaan atau pranata sosial di masyarakat, termasuk kearifan lokal yang selama ini secara turun temurun dipatuhi dan dijadikan pedoman hidup bagi warga masyarakat tertentu di pedalaman. Perubahan pola dan gaya hidup kearah modernisasi merupakan salah satu contoh yang tidak dapat dihindari kehadirannya ditengah-tengah masyarakat.

Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Departemen Sosial yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengembangkan ketahanan sosial masyarakat sebagai salah satu elemen untuk memperkuat ketahanan nasional, pranata sosial merupakan salah satu wadah untuk mencapai tujuan tersebut. Ketahanan sosial masyarakatpun dapat diwujudkan ditengah semakin menyusutnya keberadaan pekerja sosial masyarakat.

Sesuai dengan Indikator Ketahanan Sosial Masyarakat yaitu perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, miskin dan penyandang masalah sosial, partisipasi sosial masyarakat dalam organisasi sosial, pengendalian terhadap konflik sosial dan kearifan lokal dalam memelihara sumber daya alam dan sosial, program pengembangan ketahanan sosial masyarakat difokuskan. Pranata sosial dalam hal ini cukup berperan penting untuk mensukseskan program ketahanan sosial masyarakat tersebut.

Untuk lebih memudahkan dan meng-efektifkan program tersebut, sebaiknya mengetahui keberadaan pranata sosial yang ada di masyarakat, terutama pada komunitas

lokal. Data dan informasi mengenai keberadaan pranata sosial ternyata belum tersedia secara memuaskan. Oleh karena itu, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Departemen Sosial pada tahun 2006 melakukan kajian untuk mengidentifikasi pranata sosial pada komunitas lokal di daerah terpencil.

Sentuhan program pembangunan berpengaruh pada keberadaan dan eksistensi pranata sosial. Diperkirakan cukup besar pengaruh program pembangunan tersebut terhadap penghidupan warga masyarakat lokal. Daerah perdesaan yang masih memegang tradisi paguyuban atau kebersamaan, sudah bergeser kearah individualistik yang dicirikan daerah perkotaan. Termasuk pula pada komunitas adat terpencil, tradisi dan adat istiadatnya sebagian telah bergeser kearah kota karena perubahan sosial, ekonomi dan politik. Saat ini cukup sulit menemui lumbung padi yang dijadikan ketahanan pangan warga masyarakat lokal. Pertanian sawah yang menggunakan pupuk kimia dengan alasan mendongkrak hasil panen, mengakibatkan matinya ikan, belut dan pemangsa hama. Padahal lumbung padi dan atau pertanian padi sawah dengan pupuk kandang, merupakan kearifan lokal yang diciptakan para pendahulu untuk menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan ikan sawah dan segala isinya untuk kebutuhan konsumsi lauk pauk.

Memperhatikan uraian di atas, kiranya perlu diketahui keberadaan pranata sosial di masyarakat pada komunitas lokal, agar dapat diketahui data dan informasinya untuk kepentingan pusat pengembangan ketahanan masyarakat, khususnya untuk unit terkait dalam merealisasikan programnya, mulai dari mengidentifikasi keberadaan pranata sosial pada komunitas lokal di daerah komunitas adat terpencil.

## B. Kerangka Konsep

Menurut Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Dir.PKAT, 2003) Pemetaan Sosial merupakan suatu kegiatan awal untuk menemukenali komunitas adat terpencil dan permasalahannya pada beberapa lokasi di wilayah desa maupun kecamatan.

Keberadaan pranata sosial sampai saat ini masih eksis dalam kehidupan masyarakat. Pranata sosial menurut Paulus Wiratomo (2004) mengutip definisi Selo Soemartjan adalah sebagai kumpulan nilai dan norma yang mengatur suatu bidang kehidupan manusia. Pranata sosial yang merupakan kumpulan nilai dan norma yang mengatur kehidupan manusia juga merupakan kebudayaan. Karena kebudayaan didalamnya juga terdapat nilai, norma dan perasaan juga merupakan pola bagi tindakan dan tingkah laku manusia yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan sosialnya. Dalam kehidupan yang nyata kebudayaan digunakan secara selektif oleh para pendukungnya, tergantung pada situasi dan kondisi, serta arena sosial tempat para pendukung kebudayaan tersebut melakukan kegiatannya.

Sebagai suatu sistem pengetahuan, pola dan corak suatu kebudayaan ditentukan oleh keadaan lingkungan dan kebutuhan dasar dari para pendukungnya. Setiap masyarakat dengan sendirinya akan memiliki kebudayaan sesuai dengan keadaan lingkungan hidup tempat mereka bermukim dan bertempat tinggal. Sebagai suatu kebudayaan dengan semua pranatanya dapat saja berubah-ubah bahkan selalu berubah secara dinamis, karena tidak ada kebudayaan yang sifatnya statis dan tertutup. Perubahan kebudayaan dapat terjadi karena adanya faktor dari dalam kebudayaan itu sendiri dalam arti para pendukungnya merasa bahwa beberapa pranata harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan obyektif yang terdapat di dalam kehidupan sosialnya. Perubahan kebudayaan dapat pula terjadi dari luar kebudayaan itu, yaitu karena adanya faktor pengaruh kebudayaan lain yang secara lambat atau cepat mempengaruhi kebudayaan tersebut.

Kebudayaan dalam pendekatan *ethnoscience* atau *cognitive anthropology* diartikan sebagai pola bagi tindakan dan tingkah laku manusia. Dengan demikian, pengertian kebudayaan adalah seperangkat pengetahuan manusia yang berisikan sistem nilai-nilai, resep-resep, *blue-print*, dan norma-norma serta aturan-aturan yang terdapat di dalam kepala manusia sebagai pengetahuan kebudayaan, yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan sosialnya, dan digunakan serta

dijadikan pedoman tindakan tingkah lakunya, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta digunakan untuk memahami, memanipulasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan hidupnya. Dalam kehidupan komunitas, kebudayaan digunakan secara selektif oleh para pendukungnya, tergantung pada situasi dan kondisi, serta arena sosial tempat para pendukung kebudayaan tersebut melakukan kegiatannya. Kebudayaan sebagai suatu sistem pengetahuan manusia dapat digolongkan dalam konteks pengetahuan yang khusus, yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan tertentu dalam kehidupan manusia pendukung suatu kebudayaan tertentu. Pengetahuan yang kompleks bagi kegiatan tertentu tersebut dikenal sebagai pranata-pranata kebudayaan atau *cultural institutions*. Besar kecilnya serta kompleksitas pranata yang dimiliki dan dikembangkan oleh suatu masyarakat, tergantung dari kompleksitas masyarakat itu sendiri.

Secara operasional dalam kehidupan dan kegiatan sosial yang nyata, pranata-pranata yang berlaku dan diterapkan tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling terkait menjadi suatu sistem yang utuh. Dengan demikian walaupun pranata kebudayaan tertentu merupakan suatu kegiatan, tindakan dan perilaku tertentu dari seseorang atau sekelompok warga masyarakat, namun sebenarnya dasar kegiatan, tindakan dan perilaku sosial tersebut, dipengaruhi dan ditentukan oleh pranata-pranata kebudayaan lain yang relevan dengan dasar pranata utamanya. Dengan kata lain, setiap pranata sebagai sub sistem kebudayaan, mempunyai fungsi bagi pranata-pranata lainnya dalam kebudayaan tersebut.

Pranata sosial suatu konsep memang masih diperdebatkan oleh para pakar ilmu sosial. Untuk menyiasati perbedaan pandangan mengenai pranata sosial, Soetarso (2002) menyikapi bahwa terlepas apakah pranata sosial, *association* atau *institution* atau *social organization* atau istilah lainnya. Untuk keperluan sosialisasi program pengembangan ketahanan sosial masyarakat, kita tidak perlu terlibat dalam diskusi akademis tentang pengertian pranata sosial, yang dibutuhkan adalah bentuk-bentuk pranata sosial yang dapat kita perankan dalam

pengembangan ketahanan sosial masyarakat di daerah, hal ini disebabkan antara lain karena kemampuan maupun jangkauan pelayanannya sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian pranata sosial adalah sistem nilai dan norma yang tersentral pada keorganisasian sebagai wadah bagi warga masyarakat menjalankan peran, fungsi. Hal lainnya kewajibannya masyarakat sebagai ekspresi pelaksanaan nilai dan norma tersebut (Rusmin Tumanggong, 2006). Dengan demikian, pranata sosial dapat berupa instansi pemerintah (Dinas Sosial di daerah, Polri, TNI, instansi lainnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat), organisasi sosial tertentu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pendidikan, organisasi profesi/disiplin tertentu, perusahaan, pabrik, industri dan lain-lain.

Menurut Bambang Rudito, kearifan lokal merupakan: (1) proses pengetahuan manusia dalam kedudukannya di lingkungan tertentu dan tertuang dalam pola hidup dan cara berfikir; (2) Keseluruhan kehidupan termasuk yang supra natural dan natural yang menjadi inti dari usaha menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bersifat unik serta spesifik; (3) Sering ditanggapi hanya dipunyai oleh masyarakat komunitas tertentu di daerah pedalaman.

Kearifan lokal adalah kematangan masyarakat ditingkat komunitas lokal yang tercermin dalam sikap, perilaku dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal (material maupun non material) yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik atau positif (Pusbangtansosmas, Balatbangsos, Departemen Sosial RI Tahun 2004). Lingkup kearifan lokal meliputi dimensi-dimensi pengetahuan lokal, budaya lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal, solidaritas lokal, solidaritas kelompok (Jim Iffe: 2002).

Pada komunitas adat terpencil, kearifan lokal diperkirakan lebih menonjol keberadaannya dibandingkan dengan pranata sosial. Hal ini mungkin karena masih dianutnya paham, nilai/norma, budaya lokal yang merupakan warisan nenek moyang mereka dan sampai saat ini masih dipegang teguh oleh adat serta adanya pengaruh atau peran ketua adat dalam dimensi kehidupan mereka.

Bila disepakati mengenai pranata sosial seperti yang diungkap di atas, menurut Sirojudin Abbas (dalam James Midgley 2005) bahwa usaha-usaha untuk memadukan pembangunan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas sesungguhnya sudah dimulai dilakukan pada awal tahun 1970-an bersamaan dengan kemunculan organisasi-organisasi non pemerintah (ornop) atau yang dikenal dengan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM). Kalangan LSM, dalam beberapa segi mengisi salah satu aspek pembangunan yang kurang memperoleh perhatian pemerintah, yakni pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan dan dalam skala mikro untuk masyarakat pedesaan dan kelompok-kelompok masyarakat miskin lainnya.

Namun tidaklah demikian dengan pembangunan di wilayah pedalaman yang dikenal dengan sebutan Komunitas Adat Terpencil (masyarakat terasing). Sebenarnya penanganan permasalahan komunitas adat terpencil sudah dimulai sejak tahun 1973 melalui *Pilot Project* yang pelaksanaannya dilakukan di beberapa propinsi. Kemudian dilanjutkan penanganannya secara intensif melalui program-program tahunan dengan cara melalui sistem dekonsentrasi. Pada tahun 2003 melalui dana dekonsentrasi Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) telah melakukan Pemetaan Sosial di 27 Propinsi. Berdasarkan dari hasil pemetaan sosial tersebut telah terhimpun jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu sebanyak 205.029 KK belum diberdayakan dan 11.101 KK yang sedang diberdayakan. Dari 205.029 KK tersebut menurut data yang telah ada sebanyak 51.712 KK yang berada di 27 Provinsi telah diberdayakan namun hasilnya belum diperoleh data yang memadai.

Kalangan Ornop/LSM mendefinisikan pembangunan sosial sebagai pendekatan yang holistik, tidak hanya memperhatikan aspek pendapatan ekonomi dan produktivitas kerja melainkan dilihat dari pembangunan manusia secara keseluruhan mencapai aspek pendidikan, kesehatan dan penguatan interaksi sosial (Corten, 1988). Berbeda dengan strategi modernisasi dan program pembangunan ekonomi yang diusung pemerintah, kalangan LSM mengutamakan kesejahteraan masyarakat pedesaan; kalangan miskin perkotaan dan

masyarakat terpencil melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dan aktifitas ekonomi mikro. Gagasan-gagasan pengembangan keswadayaan (*self-reliance*) dan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, dibingkai di dalam kerangka pembangunan sosial.

Korten (1982) mengatakan bahwa pembangunan mampu mengembangkan keswadayaan masyarakat apabila pembangunan itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*people centered development*). Pembangunan yang berpusat pada masyarakat dapat direalisasikan apabila memanfaatkan organisasi lokal yang ada di masyarakat.

Dalam perspektif pekerjaan sosial, nilai sosial budaya dan organisasi lokal merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau modal sosial (*social capital*) dalam rangka pembangunan masyarakat.

### C. Metodologi

Kajian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan identitas, sumber daya dan program kerja Komunitas Adat Terpencil.

Penentuan lokasi ditetapkan secara *purposive*, yakni ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mengetahui wilayah atau daerah yang dianggap memiliki pranata sosial di pedalaman (komunitas adat terpencil). Untuk itu penetapan lokasi ditetapkan satu Kabupaten TTU yang diambil satu Kecamatan, yakni Kecamatan Biboki Selatan Desa Tautpah-Kampung Tamkesi.

Penetapan responden dalam kajian ditetapkan secara *purposive*, yaitu terhadap Pejabat instansi Dinas Sosial dan Instansi terkait yang mengetahui tentang keadaan dan kondisi pranata sosial yang ada di lokasi Komunitas Adat Terpencil.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Disamping itu untuk melengkapi data dan informasi diadakan *Focus Group Discussion* (FGD). Dengan FGD diharapkan dapat diperoleh data sekunder dan informasi yang sangat diperlukan. Analisa data dilakukan dengan cara analisa kualitatif.

## II. HASIL KAJIAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Kajian

Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kampung Tamkesi merupakan KAT yang memiliki Tipologi KAT Pegunungan. Karena komunitas tersebut bermukim di Kampung Tamkesi dan terletak di bawah dua buah gunung kembar, yaitu Gunung Oepuah dan Gunung Tapengah yang merupakan pusat Pemerintahan Kerajaan Biboki pada masa lalu. Jarak dari KAT Kampung Tamkesi ke pusat desa Tautpah kurang lebih 3 km dengan melewati jalan setapak yang hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki dengan lama perjalanan antara satu jam sampai dua jam. Bila menggunakan kendaraan bermotor harus melalui jalan melingkar dan medan yang sulit, hanya bisa dilakukan apabila kondisi jalan tidak becek/musim kemarau.

### B. Gambaran Umum Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Kajian

KAT di Kampung Tamkesi adalah merupakan komunitas kecil pada sebagian besar wilayah desa Tautpah dan sebagian kecil wilayah Desa Tokbesi. Kelompok kecil masyarakat itu bertempat tinggal pada daerah pegunungan atau daerah pedalaman pada masa lalu dikenal sebagai wilayah Kerajaan Biboki. Dimana sekarang masuk wilayah administrasi Kabupaten TTU yang terbagi menjadi tiga kecamatan yakni, Kecamatan Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Utara dan Kecamatan Biboki Anleu (BPS, TTU Dalam Angka, 2005).

Tamkesi oleh pemerintah daerah, ditetapkan menjadi desa adat. Tamkesi sendiri secara administrasi bagian dari Desa Tautpah, masuk dalam wilayah Dusun III Usboko, dan merupakan kampung kecil di puncak gunung dengan jumlah Kepala Keluarga 18 KK. Kampung Tamkesi merupakan kampung tradisional/adat, dihuni oleh sekelompok masyarakat kecil dari berbagai suku, hanya oleh karena rasa tanggung jawab, mereka akan kelestarian adat istiadat suku bangsa Usboko, Amfotis di Kerajaan Biboki.

Desa Tautpah dan Desa Tokbesi sudah cukup terbuka di dalam pergaulan dengan masyarakat luar, karena dibukanya jalur

transportasi jalan yang menjangkau desa ini baik dari wilayah Kabupaten TTU maupun dari Kabupaten Belu pada tahun 1983. Jalur jalan yang menghubungkan Desa Tautpah dari wilayah Kabupaten Belu sudah beraspal kasar namun sudah rusak. Sedangkan dari arah Kabupaten TTU 9 km menjelang Desa Tokbesi dan 13 km menjelang Desa Tautpah masih dalam bentuk tanah, jika hujan tidak bisa dilewati kendaraan, karena medannya yang sulit dan licin.

Desa Tautpah dan Tokbesi sendiri berada dalam kawasan hutan produksi terbatas. Wilayah kawasan dominan berbukit, dengan salah satu puncaknya adalah Kampung Tamkesi. Puncak dengan dua bukit batu yang menjulang tinggi yang salah satunya adalah tempat upacara adat. Vegetasi yang dominan dalam kawasan ini adalah padang rumput, yang sudah sejak tahun 1950-an dijadikan padang penggembalaan, dengan ternak unggulan sapi bali.

Kawasan cagar budaya Kampung Tamkesi berada dalam wilayah RT2 Usboko. RT2 sendiri memiliki 47 KK; sedangkan dikawasan Kampung Tamkesi memiliki 18 KK. Mereka tinggal di rumah-rumah adat yang berbentuk bulat yang atapnya terbuat dari rumput ilalang dan berjuntai ke tanah. Rumah-rumah adat itu dibangun pada lereng bukit, dengan terlebih dahulu tanahnya diratakan, agar tebing tidak longsor maka disusun batu-batu kecil dan besar pada dinding tebing.

Dinding tebing yang tersusun dari bebatuan yang rapi, dibuat sudah ratusan tahun yang lalu. Pemukiman Tamkesi dikelilingi benteng lapis tiga. Pembuatan benteng untuk mempertahankan keser/raja mereka dari jangkauan musuh (Belanda dan Jepang). Di lokasi ini terdapat banyak tempat yang masih keramat, digunakan untuk upacara adat dan religi. Menurut mereka tempat yang paling keramat adalah rumah raja dan yang boleh masuk ke rumah raja hanyalah raja sendiri, yang lainnya amat tabu untuk diizinkan masuk ke rumah raja. Di dalam rumah keser ada "Tateot Na Uisneno" orang yang menjaga rumah keser dan rumah tersebut hanya sebagai tempat Uisneno saja. Menurut kepercayaan mereka keser adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia.

Selain rumah keser ada juga rumah suku dimana pada setiap rumah suku (rumah adat/

rumah besar) terdapat Bahane, yaitu altar kecil yang berfungsi untuk menaruh sesajen. Altar ini terbuat dari pohon kayu yang dipipih dengan ukuran tinggi 1,5 M. Pada bagian atasnya ditaruh kayu pipihan berukuran 25 x 30 cm dan di atas kayu pipihan tersebut dibuatkan sebuah rumah kecil yang berfungsi untuk menaruh sesajen.

### C. Sejarah Perkembangan Komunitas Adat Terpencil

Pada masa lalu, upacara adat masih sangat intensif dan selalu saja diikuti dengan adanya persembahan berupa seorang wanita cantik. Pada perkembangan selanjutnya, persembahan ini kemudian menjadi sumber konflik yang berujung pada munculnya pihak ke tiga, yaitu bertahtanya raja dari Malaka.

Suku Usboko, Amfotis yang berdiam di Kampung Tamkesi berupa komunitas kecil di sebagian besar wilayah hutan produksi terbatas desa Tautpah dan wilayah hutan produksi terbatas yang berada di wilayah Desa Tokbesi. Kelompok kecil masyarakat itu bertempat tinggal di daerah pegunungan atau daerah/wilayah pedalaman, pada masa lalu daerah tersebut dikenal sebagai wilayah Kerajaan Biboki.

Menurut sejarahnya, sebelum Indonesia merdeka atau pada masa Hindia Belanda, Wilayah Kabupaten TTU, secara administrasi terbagi tiga kekuasaan kerajaan, yakni Kerajaan Miomafo, Insana dan Biboki. Dari tiga kerajaan tersebut yang masih bertahan sampai sekarang hanyalah kerajaan Biboki dengan ibu kota kerajaan di Kampung Tamkesi. Lokasi Kampung Tamkesi adalah pusat kerajaan Biboki yang keberadaannya sampai sekarang masih lestari.

Sebelum Kampung Tamkesi sebagai pusat Kerajaan (Sonaf) Biboki, Sonaf Biboki berpusat di Desa Oepuah (daerah Wini) yang bernama "Kolan Ha Siun Ha". Menurut penuturan Amaf Belsikone (juru bicara Sonaf Tamkesi), sudah enam orang raja yang menempati Sonaf Tamkesi. Dua raja yang terakhir sudah tidak menempati Sonaf Tamkesi. Hal ini terjadi setelah kemerdekaan Indonesia dan sistem Pemerintahan Swapraja diganti dengan sistem pemerintahan yang baru.

Meskipun raja sudah tidak menempati Sonaf Tamkesi namun sistem pemerintahan

Keraton Tamkesi masih berlangsung sampai sekarang. Di dalam sistem pemerintah Sonaf Tamkesi, Raja dalam melaksanakan pemerintahannya dibantu oleh "Maen Leun Atoin Leun" yang bertugas sebagai pembantu raja. Sedangkan dalam proses pengambilan keputusan, Raja dibantu oleh dua Amaf yaitu Amaf Belsikone yang menjaga wilayah Pintu Sonaf Bagian Timur dan bertempat tinggal di Desa Tokbesi serta Amaf Paisanaunu yang menjaga Pintu wilayah Sonaf Bagian Barat. Setiap perkara yang ada di Sonaf Tamkesi diputuskan oleh dua orang Amaf ini dan raja hanya mengukuhkan keputusan yang sudah dibuat.

Penghormatan kepada raja oleh masyarakat yang mendiami daerah kekuasaan Raja Biboki masih berlangsung sampai saat ini. Pengaruh pimpinan puncak (Raja Biboki) masih sangat kuat. Pimpinan puncak wilayahpun sudah memiliki wawasan yang luas, dan menginginkan adanya perubahan di wilayahnya. Pada bulan Nopember setiap tahunnya masyarakat menghantarkan upeti kepada raja berupa jagung dan padi. Menurut kepercayaan masyarakat, hujan turun setelah proses penyerahan upeti kepada raja berlangsung. Penyerahan upeti diatur oleh kepala suku bersama dua amaf yang ada di Sonaf Tamkesi. Pada setiap bulan Nopember, sisa upeti dari tahun lalu diturunkan dari lopo akan diganti dengan upeti yang baru. Sisa upeti dibagikan kepada masyarakat yang bertempat tinggal disekitar Sonaf Tamkesi.

Kampung Tamkesi, oleh pemerintah daerah dikembangkan menjadi desa adat. Tamkesi secara administrasi adalah bagian dari desa Tautpah yang masuk wilayah dusun III Usboko dan merupakan kampung kecil yang letaknya di puncak gunung yang dihuni 18 KK.

#### D. Pranata Ekonomi dan Sistem Mata Pencapaian

Masyarakat Kawasan Tamkesi berprofesi sebagai petani polifalen, artinya petani yang mengusahakan lebih dari satu jenis kegiatan pertanian. Mereka sebagai petani tanaman pangan, tanaman keras atau tanaman tahunan dan peternak. Sistem perekonomian umumnya masih sub sistem, mereka bekerja hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Untuk mengetahui mata pencaharian dan sistem perekonomian yang ada di lokasi ke dua dusun tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Ladang Berpindah

Masyarakat di Kabupaten TTU, berladang secara berpindah merupakan mata pencaharian pokok penduduk yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Tahapan pengolahan lahan untuk berladang adalah sebagai berikut: pemilihan lokasi lahan; menebas; menebang; membakar; menanam; merumput; memanen jagung dan menyimpan hasil panen.

##### 2. Perkebunan

Perkebunan yang ada di lokasi kajian adalah kemiri dan mente yang dimulai pada tahun 1983. Namun kedua tanaman ini kurang diminati petani lokal, karena mente rendah produktifitasnya, sementara kemiri adalah tanaman yang dianggap tabu. Padahal kemiri tumbuh subur di wilayah kajian dengan produksi yang tinggi di atas 15 kg per pohon. Namun karena tanaman kemiri dianggap tabu maka warga KAT terlambat menanam kemiri di kebun mereka, kalau ada yang menanam hanya ada 1-2 pohon yang sudah berbuah untuk satu Kepala Keluarga.

##### 3. Peternakan

Orang Kampung Tamkesi tidak asing dengan ayam kampung, babi, kambing dan sapi. Karena jenis binatang ini terlihat banyak berkeliaran di desa-desa yang menuju daerah pemukiman kampung Tamkesi. Jenis ternak tersebut merupakan jenis ternak yang umum dipelihara oleh orang di lokasi kajian.

##### 4. Perdagangan

Penduduk dusun ini mempunyai kecenderungan untuk tidak bergerak (mobilitas) ke pusat perdagangan, faktor utamanya adalah biaya yang mahal. Perdagangan yang bisa mereka lakukan adalah menjual hasil pertanian dan peternakan ke pasar tradisional yang ada

di Desa Tautpah setiap hari Jum'at dan Ibu kota Kecamatan Setiap Hari Minggu.

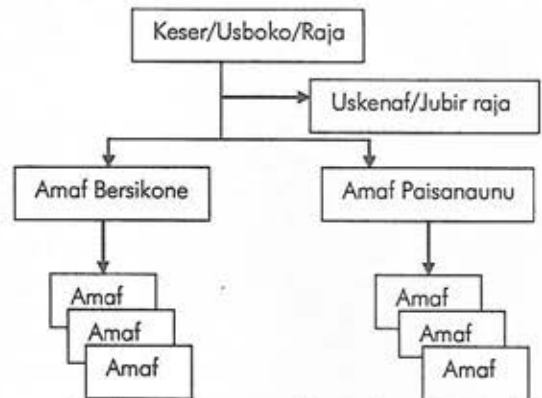
Kemiri dan mente yang di jual belum dikupas. Karena penduduk belum memiliki ketrampilan untuk memecah kemiri dan mengupas Mente. Kemiri berpolang (masih ada kulit lengkap) dijual dengan harga Rp.250,-/kg. Padahal di Naukae yang masuk wilayah Kabupaten TTU kemiri dijual dengan harga Rp.1.500,-/kg, Ubi jalar dijual dengan harga Rp.10.000,- - Rp.15.000,- per karung, dan jagung dijual dengan harga Rp.500,- per kg. Jagung dijual hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak.

#### E. Pranata Politik, Kelembagaan Sosial dan Kepemimpinan

##### 1. Struktur dan personil kelembagaan adat

Di Wilayah Kefamenanu Kabupaten TTU dahulu terdapat tiga orang bersaudara, yaitu: Mafotaek, yang cucunya adalah Suku Miamafa dengan Raja Uskono; Sinataek yang cucunya adalah Suku Insana dengan Rajanya Taolin dan Boki Taek yang anak cucunya adalah Suku Biboki. Pada masa Hindia Belanda, Wilayah Kabupaten TTU, secara tradisional terbagi atas tiga kerajaan, yakni Kerajaan Miomafo, Insana dan Kerajaan Biboki. Kerajaan Biboki terdiri dari tiga suku besar, yakni Amaf Usboko; Usboko membawahi dua suku besar lainnya yakni, Suku (Amaf) Bersikone dan Suku (Amaf) Paisanaunu, kedua suku tersebut membawahi kelompok-kelompok kecil yang bermukim dan memencar di wilayah Biboki, dimana kelompok kecil tersebut juga dipimpin oleh kepala suku. Usboko adalah keser atau raja di kerajaan Biboki berasal dari suku Usboko. Usboko tinggal di rumah adat Tamkesi yang merupakan pemukiman desa adat. Amaf diakui keberadaannya karena kemampuannya memimpin kelompok kecil suku (klonin) baru. Kemampuan itu ditentukan oleh keberhasilan Amaf baru sebagai pemimpin petani, peternak, menyelesaikan masalah sengketa atau

perkara di dalam kelompoknya, bijaksana, adil dan jujur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Pemerintahan Adat di Kampung Adat Tamkesi sebagai berikut:



Gambar tersebut merupakan struktur Pemerintahan Kerajaan Biboki pada saat masih dijajah oleh Hindia Belanda, sampai dengan tahun 1942.

Untuk masuk ke Desa Adat Tamkesi, orang-orang Biboki dapat melalui tiga pintu, yaitu Eno Oebnah yang terletak di sebelah timur dan dihuni oleh suku (Amaf) Paisanaunu. Sedangkan pintu masuk wilayah selatan ditempati Suku (Amaf) Bersikone melalui pintu Eno Am Unah. Sedangkan pintu Eno Naikah (pintu gerbang kerajaan) adalah ditempati khusus untuk keturunan Usboko/raja.

Raja dalam pemahaman masyarakat Biboki menempati posisi yang amat sakral. Dalam memimpin dan memerintah rakyat dikuasakan kepada para Amaf (ketua kelompok). Para Amaf bertanggung jawab kepada rakyatnya atau kelompoknya. Menurut masyarakat Biboki raja yang sakral adalah sumber kesejahteraan, ketentraman dan kedamaian. Raja adalah kekuatan pengendali alam karena raja dianggap bisa mengendalikan hujan, penyakit, kesuburan tanah, populasi hewan dan nasib hidup rakyat. KAT Tamkesi masih taat kepada pimpinannya (raja) sehingga harapan dari Raja Biboki agar terjadinya perubahan di wilayah ini pasti akan diikuti dengan baik oleharganya.

Menurut masyarakat raja yang sakral, tabu untuk dilihat oleh rakyat di sembarang tempat. Ia hanya boleh menampakkan diri kepada rakyat, pada waktu dan di tempat tertentu saja. Selain itu raja hanya ada di dalam rumah dan dijaga dengan sangat ketat oleh para Maob atau jabatan panglima perang kerajaan Biboki.

Dewasa ini sudah banyak berubah, ditandai dengan adanya kebiasaan raja memilih tinggal di daerah persawahan untuk mengerjakan sawah dan mengembalakan sapi. Pada masa yang lalu raja/keser sangat tabu menyentuh tanah (bekerja). Raja hanya tahu makan yang diberikan rakyatnya melalui upeti dan juga mendapatkan sumbangan tenaga sebagai abdi raja yang setia.

Raja hanya bisa berkomunikasi dengan Amaf, itupun hanya satu kali dalam satu tahun dan yang menyangkut hal-hal yang sangat penting dan hanya dapat dilakukan dalam tempat-tempat yang tertentu. Selain itu komunikasi antara Amaf dengan raja diatur oleh Uskenaf (juru bicara raja). Tugas Uskenaf adalah menyampaikan pesan atau titah raja kepada Amaf untuk selanjutnya disampaikan kepada rakyat (klonin) atau pengikut dari masing-masing Amaf.

Raja Biboki yang masih hidup bernama Nesi Iba yang tinggal diluar Kampung Adat Tamkesi, mengikuti lahan sawah yang dimilikinya. Untuk menjaga rumah adat yang ada di Kampung Tamkesi dipercayakan kepada Ignatius Taek Usboko.

2. Struktur dan personil kelembagaan formal.

Pada zaman pendudukan Jepang, Biboki mulai mengikuti struktur pemerintahan yang ditetapkan Jepang. Pada waktu pemerintahan Jepang, Kerajaan Biboki di pimpin oleh 5 orang Vektor, yaitu Vektor Oetasi, Ustetu, Bulifani, dan Herneno (Mammen) dan Taito. Setelah Indonesia merdeka pimpinan yang ada di Desa Adat Tambesi mengikuti struktur pemerintahan yang ada dan masuk wilayah Usboko III Desa Tautpah yang merupakan wilayah pengkajian dan memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Urusan Keuangan dan Ketua RT/ RW. Struktur Pemerintahan di Kerajaan Biboki pada waktu Pendudukan Jepang adalah terdiri dari Keser atau Usboko atau raja. Menurut sejarahnya setelah Indonesia merdeka wilayah kerajaan Biboki merupakan cikal bakalnya wilayah yang sekarang merupakan wilayah kecamatan. Sedangkan dibawah kerajaan Biboki ada Vektor. Wilayah yang dipegang seorang vektor setelah Indonesia merdeka menjadi wilayah desa yang sekarang dipegang oleh seorang kepala desa/kelurahan. Selanjutnya dibawah vektor ada temukung yang sekarang merupakan wilayah Rukun warga dan dibawah temukung ada nakaf yang merupakan wilayah rukun tetangga, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar tersebut menunjukkan perubahan struktur pemerintahan Kerajaan Biboki pada waktu penjajahan Jepang di Indonesia. Dimana pada waktu tersebut Kerajaan Biboki adalah cikal bakalnya kecamatan-kecamatan, sedangkan Vetor adalah cikal bakalnya desa dan temukung adalah merupakan cikal bakalnya Rukun Warga dan nakaf adalah cikal bakalnya Rukun Tetangga.

Secara administrasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, sedangkan untuk tugas lainnya yang berhubungan dengan masyarakat, pembangunan, keamanan dan ketertiban diserahkan kepada para kepala urusan. Sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1974, disebutkan bahwa Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuh kembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Di desa ini kepala merupakan jabatan terhormat, tanpa ada imbalan materiil, tidak ada hak dimana penduduk menyisihkan waktu untuk mengerjakan pekerjaan kepala desa dan suka rela ikut turun tangan membantu meringankan tugas-tugas kepala desa, bahkan membantu urusan rumahtangga terutama dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari.

Kepala desa tidak memperoleh penghasilan yang dapat menunjang hidupnya dari jabatan yang disandangnya. Karena sampai saat ini honorarium para perangkat desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/Pambekal  
: Rp.350.000,-
- b. Sekretaris Desa  
: Rp.300.000,-
- c. Kaur  
: Rp.250.000,-

#### F. Pranata Agama, Religi dan Kepercayaan

Di Desa Tautpah juga termasuk Kampung Desa Adat Tamkesi penduduknya 100 persen beragama Katholik, dan telah dibangun tempat ibadah yakni dua Kapel semuanya atas usaha swadaya masyarakat. Pelaksanaan ibadah umat Katholik dilaksanakan setiap hari Minggu di Kapel-kapel yang telah ada. Selain itu juga dilakukan melalui kegiatan membaca doa-doa yang dilaksanakan kegiatan di rumah-rumah penduduk sekali setiap minggu.

Selain menjalankan ibadah sesuai ajaran agama, Suku Usboko, Amfotis di Tamkesi masih mengembangkan religi asli dari warisan nenek moyang mereka yang diselenggarakan setiap setahun sekali pada bulan Oktober atau Nopember yang dinamakan upacara Tatamamaus. Pada kesempatan upacara Tatamamaus semua anggota suku dibawah pimpinan kepala sukunya (Amaf) datang ke Kampung Tamkesi membawa upeti, berupa hasil pertanian (padi, jagung dan umbi-umbian) dan hasil temak untuk dipersembahkan kepada raja. Upacara didahului doa, menurut sistem kepercayaan orang Tamkesi, yang dipimpin oleh penjaga rumah adat.

Selain upacara adat seperti tersebut di atas orang suku di lokasi kajian juga masih mempercayai adanya roh halus yang mendiami batu dan pohon besar dan menjaga laut. Hal ini terlihat dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Adat Terpencil di Tamkesi, yakni berupa upacara unik yang dilakukan di dalam Sonaf Tamkesi yaitu persembahan kepada Tuhan Yang Kuasa yang dilakukan pada bulan September atau Oktober setiap tahunnya. Persembahan ini berupa persembahan satu ekor kambing jantan dan satu ekor ayam jantan berbulu cerah bisa berwarna merah maupun berwarna putih yang di antar oleh seorang petugas khusus yang

bernama "Ustetu". Ustetu membawa kambing dan ayam ke atas puncak Gunung Tapenpah yang cukup tinggi dengan cara dipikul.

Upacara Tatamamaus ini ditandai dengan membawa persembahan yang berupa seekor kambing merah yang dibawa oleh lelaki dari Suku Ustetu. Setelah mendapatkan restu dari raja/keser dengan meletakkan tangan diatas kepala, lelaki yang membawa persembahan tersebut memanjati bukit batu dengan tebing yang amat curam dengan kemiringan di atas 90 derajat. Selanjutnya dilakukan oleh orang / para pembawa persembahan dengan jumlah kelipatan 7 dimana jumlah anggota pembawa persembahan bisa hanya 7 orang lelaki, 14 orang lelaki atau 21 orang lelaki. Para pembawa persembahan dengan jumlah kelipatan 7 orang lelaki tersebut membawa hewan yang dibawa adalah seekor ayam jantan. Setelah mendapatkan restu dan doa dari keser/raja para pembawa persembahan yang terdiri dari kelipatan 7 orang lelaki tersebut membawa ayam jantan ke puncak bukit yang kemudian ayam jantan tersebut ditambatkan di puncak bukit dan dibiarkan sampai mati sendiri. Suku yang membawa persembahan ke puncak bukit batu itu juga adalah Suku Ustetu. Karena secara adat yang membawa persembahan ke puncak bukit batu itu harus Suku Ustetu, tidak boleh digantikan dari suku lain.

Di puncak bukit batu keramat itu kambing disembelih di atas altar batu dengan permukaan yang datar. Kambing kemudian dipotong-potong dan dimasak atau dibakar kemudian dimakan secara beramai-ramai, dan tabu membawa kembali daging dari puncak bukit batu.

Di puncak bukit tersedia air atau ada sumber air yang diberi nama "Tapempah" dan biasa digunakan untuk memasak daging kambing. Di tempat ini tersedia pula sumber air, kayu bakar, periuk tanah, piring batu dan sendok. Di bukit ini kambing disembelih di atas mebah, dikuliti, dipotong-potong, direbus lalu setelah masak dimakan bersama-sama sampai habis. Daging kambing tidak boleh dibawa kembali ke pemukiman. Ayam berwarna cerah (merah dan putih) yang dibawa ketika itu diikatkan pada sebatang kayu dan dibiarkan sampai mati sendiri.

## G. Pranata Kesehatan dan Pengobatan

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lokasi Komunitas Adat Terpencil ini sudah ada Puskesmas Pembantu sebagai tempat berobat bagi masyarakat yang bermukim di Kawasan Tamkesi. Puskesmas Pembantu tersebut dilayani oleh seorang perawat dan seorang bidan. Puskesmas Pembantu tersebut letaknya di Desa Sufa dengan jarak tempuh sekitar 6 km dari kawasan Tamkesi

## H. Pranata Pendidikan, Pengetahuan dan Teknologi

### 1. Pranata Pendidikan.

Untuk menunjang kegiatan di bidang pendidikan, di Desa Tautpah telah dibangun 1 buah Sekolah Dasar Katholik (SDK). Murid sekolah ini pada tahun 2005 sebanyak 182 orang, tenaga guru 6 orang. Anak-anak yang tamat dari SDK ini kebanyakan tidak melanjutkan ke SMP karena jauh dari desa dan keadaan ekonomi orang tua mereka yang tidak mampu membiayai anak-anaknya hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Proses pembinaan untuk mentaati keharusan berbuat atau tidak berbuat menuntut keharusan tata nilai atau norma yang lazim dianut dalam masyarakat. Dalam menerapkan disiplin pengendalian sosial dan sopan santun dalam bergaul khususnya kepada orang yang lebih tua, orang tua mengajarkan anaknya sejumlah kata yang seharusnya diucapkan pada orang yang lebih tua sebagai rasa hormat. Selain itu juga dalam bertingkah laku diajarkan hal-hal yang seharusnya dilakukan, diharapkan orang yang sedang berbincang atau duduk-duduk harus berjalan menundukkan badan atau lebih baik berjalan dibelakangnya. Bila ketentuan ini tidak ditaati oleh si anak, maka secara langsung akan ditegur dan diberi nasehat tentang apa yang seharusnya dilakukan anak.

2. Sistem Tehnologi (Tempat Perlindungan, Alat Transportasi, Senjata, Alat-alat Produksi).

Masyarakat yang menempati Kawasan Tamkesi masih jauh dari sentuhan teknologi, unsur modern yang masuk di wilayah Kawasan Tamkesi hanya berupa perlengkapan dapur, pakaian serta sabun mandi dan sabun cuci. Sedangkan perlengkapan dan peralatan modern seperti bahan bangunan (seng, paku, semen, besi beton) tidak diperbolehkan masuk ke dalam lingkungan Kawasan Desa Adat Tamkesi.

Dalam bidang pertanian, mereka juga masih sangat sederhana, jauh dari penggunaan alat dan sistem pertanian modern, seperti memakai traktor, pupuk kimia, pestisida dan adanya benih unggul. Petani di lokasi kajian pada umumnya hanya menggunakan parang dan linggis. Bibit tanaman yang dapat disediakan hanyalah bibit tanaman yang berasal dari sisa panen tahun lalu yang sengaja disisakan/disimpan sebagai benih. Dalam pemeliharaan tanaman, para petani hanya membersihkan tanam-tanaman pengganggu (gulma) dan tidak pernah memberikan pupuk atau pestisida kalau tanaman terserang hama atau penyakit.

- I. Pranata Keturunan dan Sistem Kekerabatan

Dalam urusan perkawinan prinsip kekerabatan di lokasi kajian adalah patriarkat, artinya dimana pihak laki-laki memberikan belis (pembelian atau mas kawin) berupa ternak, lempengan perak, dan uang tunai kepada pihak perempuan dan perempuan akan masuk dalam marga laki-laki (suaminya) dan pindah ke rumah keluarga laki-laki. Sedangkan untuk penyelenggaraan pesta perkawinan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan antara kedua keluarga besar.

Pada dasarnya masyarakat di lokasi kajian sudah bersikap kurang/tidak terbuka terutama dalam hal memilih jodoh, artinya masyarakatnya masih terpaku dalam perkawinan *endogamy* saja, salah satu warga/sanak keluarga yang memilih jodoh di luar dari

sukunya/penduduk di luar dusun dianggap suatu hal pelanggaran adat. Akan tetapi perkawinan yang berasal dari kalangan mereka sendiri merupakan perkawinan yang diidealkan.

- J. Pranata Hubungan Sosial dan Jaringan Kerja

Hubungan dengan masyarakat sekitar dusun sangat baik, intensitas hubungan dengan masyarakat yang paling sering adalah dengan masyarakat Desa Tautpah. Kontak dengan pemerintah dan intensitas kehadiran orang luar biasanya terjadi karena urusan ekonomi atau urusan jual beli hasil pertanian dan pemenuhan kebutuhan pokok. Untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan keseluruhan bahan pangan diperoleh dari luar dusun, selain belanja langsung di pasar yang ada di desa tersebut, dengan cara menjual hasil ladang, temak dan kebun, hasil dari penjualan tersebut dimanfaatkan untuk membeli bahan kebutuhan pokok.

Dengan demikian dari hasil kajian di lokasi dapat dikatakan belum tampak adanya jaringan kerja antar kelompok/perkumpulan sosial yang ada, kecuali kelompok-kelompok yang terbentuk karena adanya kebutuhan yang sama yang sebagian telah membentuk jaringan kerja, namun jaringan kerja itu masih terbatas dengan kelompok sejenis dan bersifat kekeluargaan. Dari hasil kajian jaringan kerja terbentuk karena adanya kelompok atau lembaga lain atau merupakan kegiatan perdagangan dan profesi pekerjaan. Sedangkan jaringan kerja bentuk pemerintah berupa jaringan sejenis vertikal (berjenjang) seperti kelompok RT/RW dan Komunitas Adat Terpencil di Kawasan Tamkesi. Sedangkan yang horizontal yang ada kelompok upacara adat dan kelompok Rukun Tetangga.

Sebagian kegiatan bertumpu pada sumber-sumber lokal maka keberadaan kelompok-kelompok bentuk masyarakat lebih diwarnai dengan dukungan lokal dan kebanyakan sumber-sumber yang digalipun lebih banyak pada intern anggota mereka atau donatur yang merasa terikat oleh kewajiban moral. Dukungan dari pemerintah terhadap perkumpulan sosial masih sangat terbatas bahkan dapat dikatakan belum ada.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pengaruh kepala adat sekarang adalah Nesi Iba Usboko (Raja Biboki) sangat kuat dalam Komunitas Adat Terpencil Kampung Tamkesi, Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kesetiaan rakyatnya dalam menjalankan pranata-pranata yang masih berlaku di masyarakat pedalaman, yaitu pranata keagamaan (religi), pranata pendidikan, pranata ekonomi, pranata sosial dan lainnya. Namun karena Raja Biboki juga memiliki wawasan yang luas dan menginginkan adanya perubahan bagi rakyatnya, sebagian wilayah mereka diserahkan kepada pengembang untuk dijadikan program pemberdayaan yang dimulai melalui program pemukiman di Kampung Tautpah dan diharapkan dapat berhasil. Dengan berhasilnya program pemberdayaan tersebut kelak akan diikuti masyarakat lainnya yang masih bermukim di pedalaman yang masuk wilayah Desa Tautpah dan Desa Tokbesi.

#### B. Rekomendasi

Rencana pengembangan Kawasan Tamkesi oleh pemerintah daerah Kabupaten TTU adalah menjadikan kawasan Tamkesi sebagai desa adat (cagar budaya) dengan pusat pemerintahan desa adalah di Sonaf Tamkesi. Rencana ini menurut informasi dari Camat Biboki Selatan realisasinya hanya menunggu turunnya Perda tentang pembentukan desa adat tersebut. Dengan demikian perlu diapresiasi secara hati-hati.

Sedangkan menurut skenario Dinas Sosial Kabupaten TTU KAT Tamkesi diusulkan untuk diberdayakan sebanyak 265 KK (termasuk 18 KK yang ada dalam kawasan Tamkesi). Kepala keluarga sebanyak 265 tersebut tersebar di kampung dan dusun di Desa Tautpah dan Tokbesi. Untuk itu diharapkan program tersebut dapat segera terlaksana baik melalui program pemukiman/relokasi KAT, pemberdayaan KUBE dan melalui pembinaan pertanian. Sekalipun Desa Tokbesi dan Desa Tautpah penduduknya sudah bermukim secara terkonsentrasi di sepanjang jalan raya, namun masih banyak ditemukan komunitas yang bermukim secara terpencar pada beberapa tempat yang sulit dijangkau dan sulit pula untuk bercocok tanam dan beternak. Warga dari dusun yang berada di kedua desa tersebut memberikan respon yang sangat positif untuk dimukimkan di lokasi baru yang merupakan binaan Departemen Sosial. Disini memerlukan penelitian kelayakan agar sesuai sasaran.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syarwani dan Meuthia Gani Rochman. 1992. *Pembangunan Swadaya Nasional*, Jakarta, LP3ES.
- Anonim. 1997. *Peranan Program Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUBE*, Jakarta, Dit. Bin Bansos.
- ..... 1998. Menteri Sosial RI Pada Sidang Kabinet terbatas Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan, Jakarta.
- ..... 2003. *Pola Penanggulangan Kesejahteraan Sosial* Menteri Sosial RI, Jakarta.
- Dorojatun Kuntjoro-Yakti. 1996. *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Florus, Paulus, et.al. 1994. *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transpormasi*, Jakarta. LP3S-IDRD dengan PT.Grasindo.

- Larso, Wursito. 1995. *Pemerataan Pembangunan Antara Harapan dan Kenyataan*, Solo. Bergetar.
- Sutopo HB. 1993. *Konsep Pembangunan Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan Ditinjau Dari Sudut Sosiologi Pembangunan Antara Peluang dan Tantangan*, Solo. Bergetar.
- Twikromo, Argo. 1993. *Pembangunan Masyarakat dan Pembangunan Kepemimpinan Kelompok*. Solo. Bergetar.
- Prastiwi, Ety. 1993. *Wanita Dalam Peranannya Sebagai Kader Pembangunan dan Ibu Rumah Tangga*. Solo. Bergetar.
- Maryanto, 1996. *Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Ekonomi Rakyat Lewat Jaringan*. Solo. Bergetar.
- Muhammd, Rusdin. 1993. *Kelembagaan Desa Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat*. Solo. Bergetar.
- Wardani, Nila. 1993. *Sebuah Bentuk Dampingan Bagi Wanita Pekerja Industri Rumah Tangga*. Solo. Bergetar.
- Midgley, James, 2005. *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, Jakarta. Diperta Islam Departemen Agama.
- Nurdin dan Suradi, 2004. *Penelitian Peranan Organisasi Lokal Dalam Pengembangan Masyarakat*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol.9, No.01, Pusbang UKS, Balatbang, Departemen Sosial.
- Korten, David.C, 1982. *Pembangunan Berpusat Pada Rakyat*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Wirotomo, Paulus, 2004. *Makalah Kontruksi Jaring Pranata Sosial Untuk Penguatan Ketahanan Sosial (Kerangka Konseptual)*, Jakarta.

#### BIODATA PENULIS :

Suyanto, Alumnus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 1989. Kini Ajun Peneliti Madya pada Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.